

BPBD Baubau Tinjau Lokasi Pohon Tumbang dan Rumah Rusak Akibat Angin Kencang di Bukit Wolio Indah



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau melakukan pendataan terhadap tiga rumah warga yang mengalami kerusakan ringan akibat terjangan angin kencang di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (15/7/2026). Peristiwa tersebut terjadi dalam waktu singkat dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-

bau, Dr. Mohamad Tasdik, M.Si., mengatakan tim BPBD langsung bergerak setelah menerima laporan mengenai kejadian cuaca ekstrem tersebut. Petugas melakukan pengecekan lapangan, dokumentasi, serta pendataan terhadap dampak yang dialami masyarakat. "Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam dua kejadian ini. Tim kami sudah turun untuk mendata dan mendokumentasikan kondisi di lapangan, termasuk tiga rumah warga yang mengalami kerusakan ringan,"

Lanjut ke Hal: 7

Progres Sensus Ekonomi 2026 di Buton Selatan Capai 56,18 Persen, Lampau Target Bulan Pertama



Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Ikhsanuddin Hamid, SST., M.Si.

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan capaian yang menggembirakan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pendataan telah mencapai 56,18 persen atau sebanyak 17.124 responden, melampaui target yang ditetapkan untuk bulan pertama

pelaksanaan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Ikhsanuddin Hamid, SST., M.Si., mengungkapkan bahwa target pendataan pada periode 15 Juni hingga Juli 2026 sebesar 40 persen telah terlampaui. Sisa pendataan ditargetkan rampung sebelum 30 Agustus 2026.

Lanjut ke Hal: 7

PANSEL UMUMKAN TIGA BESAR KANDIDAT JPT PRATAMA BUTON SELATAN 2026

UNTUK 10 JABATAN, INI DIA NAMA-NAMANYA

SELEKSI TERBUKA & TRANSPARAN

KETUA PANSEL

“Peserta yang masuk tiga besar pada 10 formasi jabatan telah ditetapkan berdasarkan hasil seluruh tahapan seleksi.”

LA ODE HARWANTO

- 30 PESERTA MASUK TIGA BESAR PADA 10 FORMASI JABATAN**
- SELEKSI TELAH SELESAI DAN DAPAT REKOMENDASI DARI BKN**
- KEPUTUSAN PANSEL BERSIFAT FINAL DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**
- TAHAP AKHIR: PPK MENETAPKAN PEJABAT DEFINITIF**

MELANGKAH BERSAMA, MEMBANGUN BUTON SELATAN DENGAN SDM UNGGUL & BERINTEGRITAS!

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP- Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi menetapkan tiga besar peserta terbaik untuk mengisi 10 jabatan pimpinan tinggi pratama tahun 2026. Pengumuman tersebut diterbitkan pada Jumat (17/7) setelah seluruh tahapan seleksi diselesaikan dan memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penetapan tersebut didasarkan pada Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 020/PANSEL-JPTP/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026 tentang penetapan nilai hasil seleksi, serta Surat Kepala BKN Nomor 35622/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 14 Juli 2026 mengenai rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Kabupaten Buton Selatan.

Lanjut ke Hal: 7

HUT Buton Selatan ke 12 Resmi Dimulai, Bupati Adios Targetkan Buton Selatan Makin Berdaya Saing



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 sebagai momentum memperkuat sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah. Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. menegaskan, kolaborasi pemerintah, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Buton Selatan yang berbudaya dan

berdaya saing. Pembukaan rangkaian HUT berlangsung melalui kegiatan jalan sehat dan senam sehat yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 12 kali, Rabu (15/7/2026).

Menurut Adios, meski pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, berbagai program pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Salah satu proyek strategis yang kini terus berproses ialah pembangunan Kantor Bupati sebagai pusat pemerintahan yang sebelumnya telah diawali dengan pe-

takan batu pertama.

"Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT kita masih diberikan kesempatan memperingati Hari Jadi Buton Selatan ke-12. Walaupun anggaran terbatas, pembangunan tetap berjalan," ujar Adios.

Selain Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga menyiapkan pembangunan sejumlah fasilitas pemerintahan lain, di antaranya Kantor DPRD, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Kantor Kepolisian Re-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Alvin Akawijaya Resmikan TMMD ke-129, Percepat Pembangunan dari Desa



Laporan: La Harman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton bersama TNI kembali memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan melalui pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun Anggaran 2026. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan bertindak sebagai Inspektur Upacara di Lapangan Sepak Bola

Ambuau Indah, Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan, Rabu (15/7/2026).

Program yang mengusung tema "TMMD Satuan Langkah, Membangun Negeri dari Desa" itu menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan melalui sasaran fisik dan nonfisik. Selain membangun infrastruktur, TMMD juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat

Lanjut ke Hal: 7

Pansel Umumkan Tiga Besar Kandidat JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan, Ini Dia Nama-namanya

yak 30 peserta dinyatakan masuk tiga besar pada 10 formasi jabatan yang diseleksi.

Ketua Panitia Seleksi La Ode Harwanto dalam pengumuman resminya menegaskan, “Peserta yang masuk tiga besar pada 10 formasi jabatan telah ditetapkan berdasarkan hasil seluruh tahapan seleksi.” Selanjutnya, nama-nama tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengumuman tersebut, Pansel juga menegaskan, “Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Buton Selatan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.” Pernyataan itu menjadi penutup seluruh proses penilaian yang telah dilaksanakan secara berjenjang.

Sistem seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2023 tentang ASN. Regulasi tersebut menekankan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan sehingga kompetensi, kualifikasi, integritas, dan rekam jejak menjadi dasar utama penentuan pejabat publik.

Secara nasional, mekanisme seleksi terbuka JPT mulai diterapkan sejak reformasi birokrasi sebagai upaya membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas intervensi politik. Prinsip serupa juga diterapkan di berbagai negara melalui sistem merit-based civil service, yang menjadi standar internasional dalam pengelolaan aparatur pemerintahan modern guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui,” demikian penegasan Panitia Seleksi dalam dokumen yang didatangkan di Batauga pada 17 Juli 2026. Tahapan berikutnya adalah penetapan pejabat terpilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan diumukannya tiga besar peserta pada seluruh formasi, proses pengisian jabatan strategis di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kini memasuki tahap akhir. Pemerintah daerah diharapkan segera menetapkan pejabat definitif agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan semakin efektif, profesional, serta selaras dengan semangat reformasi birokrasi.

Adapun tiga besar peserta pada masing-masing formasi yakni Kepala Dinas Pendidikan, La Ode Firman Hamzah meraih nilai 90,62 (peringkat I), La Barju 77,59 (peringkat II), dan La Ode Muhammad Alauddin 76,08 (peringkat III).

Pada formasi Kepala Dinas Kesehatan, Yerti memperoleh nilai 82,76 (I), dr. La Ode Achmad Amanah Maulana 79,64 (II), serta Bakri Abdullah 76,20 (III).

Formasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menempatkan Iwan Mulyawan dengan nilai 81,02 (I), Julan Satriah 80,15 (II), dan Darmin 78,98 (III).

Untuk Kepala Dinas Perhubungan, Herinati Antji mencatat nilai 80,62 (I), La Ode Muhammad Ilmayang Amlu 78,93 (II), dan La Ode Suhari 76,82 (III).

Pada formasi Kepala

la Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rusman Alam Purnama memperoleh nilai 84,78 (I), La Ode Muhammad Saidiman 80,29 (II), dan La Ode Miru 79,29 (III).

Sementara pada Kepala Dinas Perikanan, Madina Hasmar meraih nilai 84,70 (I), Muhammad Dafis Kasri 79,53 (II), dan Syamsul 76,37 (III).

Untuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sadii memperoleh nilai 86,02 (I), Ahmad Rizal 83,14 (II), dan Muhammad Basri 80,02 (III).

Pada formasi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, La Ode Daniel meraih nilai 81,28 (I), La Ode Muhammad Hidayat 80,07 (II), dan La Ode Muhammad Musnawir 79,54 (III).

Selanjutnya, pada formasi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Hasmin Joko memperoleh nilai 82,83 (I), La Ode Muhammad Mustari 80,35 (II), dan Hariyati Kanang 76,29 (III).

Adapun pada formasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Haida mencatat nilai 85,36 (I), La Ode Aris Hardian 82,33 (II), dan Nuhul Mufida 78,37 (III).(*)

BPBD Baubau Tinjau Lokasi Pohon Tumbang dan Rumah Rusak Akibat Angin Kencang di Bukit Wolio Indah

ujar Tasdik kepada Baubau Post.

Menurut laporan BPBD, kejadian bermula sekitar pukul 10.45 WITA di Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah. Sebatang pohon tumbang akibat kondisi angin kencang, namun peristiwa tersebut tidak menyebabkan kerusakan material maupun korban.

Setelah itu, sekitar pukul 11.01 WITA, angin kencang kembali menerjang kawasan yang sama. Hembusan angin menyebabkan tiga rumah warga mengalami kerusakan, yakni rumah Nasrun yang rusak pada bagian dapur, rumah Muh. Hasrul pada bagian dapur dan kamar mandi, serta rumah Syarifudin Ridy yang mengalami kerusakan pada atap rangka baja ringan lantai dua.

“Beruntung, tidak

ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut,” kata Tasdik.

Tasdik menjelaskan, untuk penanganan pohon tumbang, BPBD Kota Baubau melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baubau karena keterbatasan peralatan evakuasi yang tersedia. Langkah koordinasi dilakukan agar proses penanganan dapat berjalan cepat dan aman.

“Karena keterbatasan peralatan untuk evakuasi pohon tumbang, penanganannya kemudian kami koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau,” jelasnya.

Fenomena angin kencang yang berdampak terhadap permukiman warga menjadi salah satu ancaman bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi

dalam beberapa tahun terakhir. Secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem masih menjadi jenis bencana yang paling dominan di Indonesia. Secara global, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) juga mencatat perubahan iklim meningkatkan risiko kejadian cuaca ekstrem di berbagai wilayah dunia.

BPBD Kota Baubau mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di kawasan rawan pohon tumbang dan terpaan angin. Masyarakat diminta segera melaporkan setiap kejadian bencana agar proses penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. (*)

Progres Sensus Ekonomi 2026 di Buton Selatan Capai 56,18 Persen, Lampaui Target Bulan Pertama

“Alhamdulillah, hingga saat ini progres pendataan telah mencapai 56,18 persen. Angka tersebut sudah melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40 persen. Sisanya akan kami selesaikan hingga akhir masa pendataan pada 30 Agustus 2026,” ujar La Ode Ikhsanuddin Hamid saat diwawancara di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2026)

Menurutnya, secara umum respons masyarakat Buton Selatan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi cukup baik. Meski demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami tujuan dan manfaat sensus sehingga petugas harus memberikan penjelasan dan sosialisasi lebih intensif sebelum proses wawancara dilakukan.

“Tantangan tersebut dapat diatasi karena setelah diberikan pemahaman, masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan,” katanya.

La Ode Ikhsanuddin juga menjelaskan bahwa tantangan terbesar pelaksanaan Sensus Ekonomi berada di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Batuatas. Selain kondisi geografis dengan gelombang laut yang cukup tinggi, keterbatasan jaringan internet juga menjadi kendala dalam proses pengiriman data.

Untuk mengatasi hal tersebut, petugas diarahkan melakukan unggah data pada malam hari ketika kualitas jaringan internet lebih stabil dibandingkan siang hari.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat di wilayah kepulauan berprofesi sebagai nelayan sehingga petugas harus menyesuaikan waktu pendataan dengan menunggu mereka kembali dari melaut agar wawancara dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaan SE 2026, BPS Kabupaten Buton Selatan melibatkan 87 orang mitra sensus, terdiri atas 75 Petugas Pencacah Lapangan (PCL) dan 12 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang bertugas memastikan kualitas hasil pendataan di lapangan.

La Ode Ikhsanuddin berharap seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pelaku ekonomi, dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang akurat.

Menurutnya, data Sensus Ekonomi memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam memetakan struktur perekonomian daerah sekaligus melihat kondisi sosial masyarakat. Hasil pendataan tersebut akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Semakin baik data yang diberikan masyarakat, semakin akurat pula kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas,” pungkasnya. (*)

HUT Buton Selatan ke 12 Resmi Dimulai, Bupati Adios Targetkan Buton Selatan Makin Berdaya Saing

sor (Polres). Pemerintah bahkan menargetkan Polres Buton Selatan dapat berdiri pada 2027 sebagai salah satu indikator meningkatnya kapasitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita bangun sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang terpenting kita terus berusaha dan bekerja bersama demi kemajuan Buton Selatan,” katanya.

Bupati juga mengajak putra-putri Buton Selatan yang berkiprah di berbagai daerah untuk ikut memberikan gagasan, pengalaman, dan pemikiran dalam mempercepat pembangunan. Menurutnya, daerah tersebut memiliki poten-

si besar, terutama di sektor pariwisata dan perekonomian, yang mulai menarik minat investor untuk berinvestasi.

“Saya yakin suatu saat Buton Selatan akan menjadi daerah tujuan wisata. Potensi yang kita miliki sangat besar dan perekonomian daerah juga terus berkembang,” ungkapnya.

Adios turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi menyaksikan rangkaian HUT ke-12 Buton Selatan, di antaranya Bank Sultra, BNI, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, para kepala sekolah, organisasi perangkat daerah, serta berbagai instansi dan mitra lainnya. Sesuai seremoni pembukaan,

Bupati bersama Ketua TP PKK, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, dan tamu undangan mengikuti sesi foto bersama.

Secara historis, Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dan diresmikan pada tahun yang sama. Selama lebih dari satu dekade, pemerintah daerah terus membangun infrastruktur pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mengembangkan sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan ekonomi masyarakat sebagai fondasi pertum-

buhan daerah.

Di tingkat nasional, penguatan daerah otonom merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang mulai diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara secara global, penguatan tata kelola pemerintahan lokal menjadi salah satu agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan membangun institusi yang efektif, inklusif, dan akuntabel guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Resmikan TMMD ke-129, Percepat Pembangunan dari Desa

mangat gotong royong, serta mempererat kemandirian masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional.

Komandan Korem (Danrem) 143/Halu Oleo Brigjen TNI Rado Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han., menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari sinergi seluruh pemangku kepentingan. “Melalui program TMMD, kita bersama-sama membangun masyarakat melalui sasaran fisik dan non-

fisik. Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI menjadi kunci percepatan pembangunan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Komandan Kodim 1413/Buton Letkol Inf. Yoni, S.Hub.Int., mengatakan TMMD merupakan implementasi nyata kemandirian masyarakat TNI dengan rakyat. “Kami berkomitmen terus bergerak membangun, mengabdikan, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Hasil TMMD harus benar-benar dirasakan warga

sekalius memperkuat kolaborasi seluruh elemen daerah,” katanya.

Dalam amanatnya, Bupati Alvin Akawijaya Putra memberikan apresiasi kepada Korem 143/Halu Oleo dan Kodim 1413/Buton yang kembali mempercayakan Kabupaten Buton sebagai lokasi pelaksanaan TMMD. “Program TMMD tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian TNI dengan

rakyat. Pemerintah Kabupaten Buton akan terus mendukung program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Upacara pembukaan dihadiri Danrem 143/Halu Oleo, Dan-dim 1413/Buton, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, para Danramil, Perwira Staf Kodim 1413/Buton, para Kapolsek, camat, kepala desa, personel TNI-Polri, pelajar, serta masyarakat. Kehadiran

bangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan wawasan kebangsaan melalui kolaborasi lintas sektor.

Dalam perspektif internasional, pelibatan militer dalam mendukung pembangunan masyarakat juga diterapkan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat melalui National Guard Civil Support, India melalui kegiatan Military Civic Action, dan Filipina melalui program pembangunan komunitas oleh angkatan bersenjata. Meski memiliki pendekatan berbeda, seluruh pro-

gram tersebut menem-patkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sebagai instrumen mempercepat pembangunan serta memperkuat ketahanan wilayah.

Melalui TMMD ke-129, Pemerintah Kabupaten Buton dan TNI berharap pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan lebih cepat, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta semangat gotong royong dan kemandirian TNI-rakyat semakin kokoh sebagai modal penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Ajak DPRD Perkuat Sinergi Usai Pelantikan Wakil Ketua II



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buton memperkuat sinergi dalam menjalankan pemerintahan daerah setelah Dr. La Subu, S.H., M.H. resmi dilantik sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat terwujudnya visi pembangunan Buton Bersinar. Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton di Aula DPRD Kabupaten Buton, Pasarwajo, Senin (6/7/2026).

Pelantikan Dr. La Subu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/156 Tahun 2026. Ia menggantikan La Madi, S.Sos. sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton untuk sisa masa jabatan 2024 - 2029. Pergantian tersebut merupakan bagian dari mekanisme konsti-

tusional dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan dan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif.

"DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan mitra sejajar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Karena itu, saya berharap kehadiran Wakil Ketua II DPRD yang baru dapat memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," ujar Bupati Alvin di hadapan peserta rapat paripurna.

Menurut Bupati, pergantian unsur pimpinan DPRD merupakan dinamika kelembagaan yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia berharap komunikasi yang terbuka, dialog yang konstruktif, dan kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD terus terpelihara sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Buton.

Bupati Alvin juga menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. La Subu atas amanah yang diberikan. Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan hanya mengandung tanggung

jawab terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan amanah moral kepada seluruh masyarakat. "Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Buton, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada saudara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton yang baru saja dilantik," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati memberikan penghargaan kepada La Madi, S.Sos. atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton. "Terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan amanah sebagai pimpinan DPRD. Semoga kontribusi tersebut menjadi bagian dari kemajuan Kabupaten Buton," ujar Alvin.

Secara historis, hubungan kemitraan antara kepala daerah dan DPRD memperoleh landasan yang semakin kuat sejak bergulirnya era reformasi melalui kebijakan desentralisasi yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan melalui Un-

dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang saling melengkapi. Di berbagai negara yang menerapkan sistem demokrasi modern, hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif juga menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Alvin mengajak seluruh unsur pemerintahan untuk terus bergandengan tangan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. "Mari kita terus memperkuat sinergi, mengedepankan dialog yang konstruktif, dan bersama-sama mewujudkan Buton Bersinar," tuturnya. Ia juga mendoakan agar seluruh penyelenggara pemerintahan senantiasa diberikan kekuatan, petunjuk, dan perlindungan oleh Allah SWT dalam mengemban amanah bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. (*)

DPR Pertanyakan Keabsahan Permenhut 9/2026 yang Terbit Saat Raja Juli di Luar Negeri



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Polemik penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 9 Tahun 2026 mencuat setelah Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mempertanyakan mekanisme penandatanganan regulasi tersebut yang dilakukan saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sedang berada di luar negeri.

Permenhut Nomor 9 Tahun 2026 mengatur perubahan atas Permenhut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Aturan tersebut disebut ditandatangani pada 13 Juli 2026, sementara Raja Juli Antoni diketahui melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sejak 11 Juli 2026.

Sorotan itu disampaikan Titiek dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7). Ia menilai proses penerbitan aturan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.

"Kenapa kementerian ini kok ceroboh sekali? Menteriya pergi tanggal 11 Juli, kok bisa menandatangani Permen tanggal 13 Juli? Kok bisa seperti itu?" ujar Titiek dalam rapat tersebut.

Menurut Titiek, persoalan utama bukan hanya mengenai waktu penerbitan aturan, tetapi juga terkait mekanisme tanda tangan yang digunakan. Ia mempertanyakan apabila dokumen tersebut

benar menggunakan tanda tangan basah, karena secara prosedural pejabat yang bersangkutan harus melakukan penandatanganan secara langsung.

"Ini kan menyalahhi aturan. Tanda tangan basah lagi, coba dicek lagi bagaimana ceritanya," katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz menjelaskan bahwa proses penandatanganan dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) melalui sistem yang terhubung dengan Kementerian Hukum. Ia menegaskan mekanisme digital tersebut menjadi bagian dari administrasi pemerintahan modern.

"Jadi sistemnya di sini belum diundangkan," kata Mahfudz saat memberikan penjelasan dalam rapat.

Namun, keterangan tersebut kembali dipertanyakan oleh anggota Komisi IV DPR yang hadir. Salah satu anggota menunjukkan dokumen melalui layar rapat yang mencantumkan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 468, sebagai bukti bahwa regulasi tersebut telah memiliki nomor pengundangan.

Perdebatan mengenai administrasi penerbitan regulasi ini berlangsung di tengah transformasi birokrasi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir semakin mengandalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik sendiri mulai diperkuat pemerin-

tah sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta berbagai aturan turunannya mengenai layanan administrasi digital.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, persoalan kewenangan pejabat saat berada di luar wilayah kerja bukan kali pertama menjadi perhatian publik. Pada era reformasi, transparansi proses administrasi pemerintahan menjadi salah satu tuntutan utama setelah berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan pada masa pemerintahan sebelumnya mendorong penguatan mekanisme pengawasan lembaga negara.

Sementara secara global, digitalisasi pemerintahan telah menjadi tren sejak awal abad ke-21. Banyak negara seperti Estonia, Singapura, dan Korea Selatan mengembangkan sistem administrasi elektronik untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus memastikan jejak audit dalam setiap keputusan pemerintah.

Hingga kini, polemik Permenhut Nomor 9 Tahun 2026 masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan administrasi, mekanisme tanda tangan, serta status resmi pengundangannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. (*)

Gubernur Sultra ASR Hadiri Raker APPSI 2026, Wamendagri Tekankan Lima Tantangan Daerah



Laporan: Mashuri

LOMBOK BARAT, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Forum tersebut menjadi wadah strategis bagi para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan agenda pemerintah pusat.

Raker APPSI tahun ini mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Tema tersebut dipilih sebagai respons atas tantangan perlambatan ekonomi global yang masih memengaruhi aktivitas ekonomi nasional, sekaligus mempertegas posisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding beberapa tahun sebelumnya karena dipengaruhi dinamika geopolitik internasional, perubahan ekonomi global, hingga tuntutan percepatan pembangunan di daerah.

“Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” kata Bima Arya.

Menurut Bima Arya, terdapat lima tantangan utama yang harus mam-

pu dijawab oleh para kepala daerah. Tantangan tersebut meliputi pengaruh geopolitik global, pengawasan program strategis nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes) dan desa nelayan, penyelarasan visi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, kemampuan memahami perkembangan media digital, serta kewaspadaan tinggi terhadap potensi persoalan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa gubernur memiliki dua peran penting sekaligus, yakni sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam kapasitas tersebut, gubernur harus mampu mengoordinasikan pelaksanaan program nasional bersama para bupati dan wali kota melalui rapat koordinasi maupun rapat kerja secara berkala.

“Gubernur harus mampu menjalankan dua fungsi secara seimbang, sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat,” tegas Bima Arya.

Selain memperkuat koordinasi, pemerintah daerah juga didorong menjadi motor transformasi pembangunan. Bima Arya menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Sebaliknya, pemerintah daerah harus mengoptimalkan efisiensi anggaran, memperkuat investasi, meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD), mengoptimalkan aset daerah, menyederhanakan regulasi, serta mempercepat penyusunan tata ruang.

Sementara itu, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa Raker dan Munaslub APPSI merupakan forum strategis untuk menyusun berbagai rekomendasi

berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.

“APPSI bukan sekadar wadah penyaluran aspirasi para gubernur, tetapi ruang kerja sama untuk mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah,” ujar Rudy Mas’ud.

Menurut Rudy, pemerintah provinsi tetap dituntut menjaga laju pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan kewenangan. Karena itu, APPSI terus mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional serta mengusulkan reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, selaku tuan rumah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada NTB untuk menjadi lokasi penyelenggaraan Raker APPSI 2026. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting mempererat kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam merumuskan solusi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Lalu Muhammad Iqbal.

Bagi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, keikutsertaan dalam forum APPSI menjadi kesempatan memperkuat sinergi antardaerah sekaligus menyerap berbagai praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam pembangunan

di Sulawesi Tenggara. Kehadiran para kepala daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin dinamis.

Secara historis, APPSI merupakan organisasi yang menghimpun seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan penyaluran aspirasi kepada pemerintah pusat. Sejak dibentuk pada awal era otonomi daerah pascareformasi, APPSI berperan aktif mendorong sinkronisasi kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, termasuk dalam penyusunan berbagai rekomendasi mengenai fiskal, investasi, hingga tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks global, penguatan UMKM yang menjadi tema utama Raker APPSI 2026 juga sejalan dengan komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan penguatan sektor usaha kecil sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Sejumlah negara di Asia maupun Eropa juga menjadikan UMKM sebagai penopang utama ketahanan ekonomi ketika menghadapi krisis global maupun perlambatan ekonomi dunia.

Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, memperluas investasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (*)

Silaturahmi Perdana Dilmil V-18 dan Pemkot Kendari Perkuat Koordinasi



Laporan: Lisa

K E N D A R I , BP- Pemerintah Kota Kendari memperkuat sinergi dengan institusi penegak hukum melalui kunjungan silaturahmi jajaran Pengadilan Militer (Dilmil) V-18 Kendari yang diterima Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, di Balai Kota Kendari, Kamis (16/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun koordinasi antar lembaga guna mendukung penegakan hukum, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tenggara.

Kunjungan itu dipimpin Kepala Pengadilan Militer V-18 Kendari, Letkol Chk Arief Rachman, S.E., S.H., didampingi tiga hakim, panitera, sekretaris, dan jajaran kepegawaian. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga menjadi momen memperkuat keberadaan Pengadilan Militer V-18 Kendari yang baru resmi beroperasi kepada Pemerintah Kota Kendari.

Kepala Pengadilan Militer V-18 Kendari menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan tersebut adalah mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam men-

dukung pelaksanaan tugas masing-masing secara profesional dan berintegritas.

“Kami berharap kehadiran Pengadilan Militer V-18 Kendari dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga pelayanan hukum kepada prajurit TNI dapat berjalan semakin efektif dan berkualitas,” ujar Letkol Chk Arief Rachman.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyambut baik kehadiran institusi peradilan militer tersebut. Ia menilai keberadaan Pengadilan Militer V-18 Kendari akan memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kondusivitas wilayah.

Pemerintah Kota Kendari menyambut baik kehadiran Pengadilan Militer V-18 Kendari. Semoga silaturahmi ini menjadi awal yang baik dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi demi mendukung penegakan hukum serta terciptanya keamanan dan ketertiban di Kota Kendari,” kata Sudirman.

Pengadilan Militer V-18 Kendari dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 dan mulai beroperasi secara resmi pada 9 Juli 2026. Kehadirannya melayani wilayah hukum Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah sehingga diharapkan mampu memperce-

pat proses penyelesaian perkara serta meningkatkan akses pelayanan peradilan militer bagi prajurit TNI di kawasan tersebut.

Secara historis, sistem peradilan militer di Indonesia telah berkembang sejak awal kemerdekaan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang menangani perkara pidana dan disiplin prajurit. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan pengadilan militer baru merupakan upaya pemerintah meningkatkan efektivitas pelayanan hukum seiring luasnya wilayah yurisdiksi. Di tingkat internasional, banyak negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia juga menerapkan sistem peradilan militer tersendiri untuk menangani pelanggaran hukum yang melibatkan personel angkatan bersenjata, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedua belah pihak sepakat memperkuat komunikasi dan koordinasi sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung penegakan hukum, menjaga stabilitas keamanan daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Jadikan Road Map Ekonomi Biru Arah Baru Pembangunan Daerah



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton mulai memperkuat arah pembangunan berbasis kelautan dengan menyusun Road Map Ekonomi Biru sebagai pedoman strategis pembangunan berkelanjutan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan lintas sektor agar pengelolaan sumber daya pesisir dan laut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Peta Jalan (Road Map) Ekonomi Biru Kabupaten Buton di Aula Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Senin (6/7/2026). Kegiatan itu melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta sejumlah mitra pembangunan sebagai bagian dari penyusunan arah kebijakan ekonomi

kelautan di Kabupaten Buton.

Menurut Alvin, Kabupaten Buton memiliki kekayaan sumber daya pesisir dan laut yang besar sehingga membutuhkan tata kelola yang bertanggung jawab. "Potensi sumber daya pesisir dan laut Kabupaten Buton harus dikelola secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestariannya bagi generasi mendatang," tegasnya.

Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan Road Map Ekonomi Biru sebagai acuan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang saling terintegrasi. "Saya berharap seluruh perangkat daerah menjadikan dokumen ini sebagai pedoman sehingga implementasi Ekonomi Biru dapat berjalan sinergis, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan penerapan konsep Ekonomi Biru tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga

membutuhkan kolaborasi perguruan tinggi, lembaga pendamping, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir. "Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar pembangunan kelautan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem," katanya.

Di akhir kegiatan, Alvin menyampaikan apresiasi kepada RARE, Institut Teknologi Kelautan Buton, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Road Map Ekonomi Biru. "Saya memberikan apresiasi kepada RARE, Institut Teknologi Kelautan Buton, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini," ucapnya.

Secara historis, konsep Blue Economy mulai mendapat perhatian dunia setelah diperkenalkan ekonom Belanda Gunter Pauli pada 2010 melalui buku The Blue Economy. Konsep tersebut kemudian diadopsi berbagai negara sebagai pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan per-

tumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut. Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadikan pelestarian laut sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 14 tentang Life Below Water.

Di Indonesia, kebijakan Ekonomi Biru menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui pengelolaan perikanan berbasis kuota, rehabilitasi ekosistem pesisir, konservasi kawasan laut, serta pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Buton melalui penyusunan Road Map Ekonomi Biru diharapkan memperkuat sinergi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional sekaligus menjawab tantangan pengelolaan sumber daya kelautan di masa depan. (*)

Pemkab Buton Tengah Terbitkan Edaran HUT Ke-12, Seluruh Instansi Diminta Berpartisipasi



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 8/687/100.4H/VII/2026 tertanggal 8 Juli 2026 sebagai pedoman pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-12 Kabupaten Buton Tengah Tahun 2026. Melalui edaran tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN/ BUMD, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, kelurahan, puskesmas, hingga sekolah negeri dan swasta diminta berpartisipasi aktif menyukreskan rangkaian kegiatan dengan mengusung tema "Menuju Kota Santri dan Kota Pendidikan Bermanfaat Berdampak Global."

Partisipasi yang dimaksud diwujudkan melalui sejumlah agenda bersama, mulai dari gerakan pembersihan lingkungan, pemasangan atribut peringatan HUT, hingga penggunaan busana bernuansa khas Kabupaten Buton Tengah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tersebut diharapkan mampu membangun semangat kebersamaan sekaligus memperkuat identitas daerah menjelang puncak peringatan hari jadi.

"Seluruh pimpinan instansi agar mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peringatan HUT Kabupaten Buton Tengah sehingga berlangsung tertib, meriah, dan melibatkan seluruh unsur di lingkungan langsung terhadap terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas. Kondisi itu, lanjutnya, akan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah menekan angka kemiskinan.

"Semakin banyak tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, semakin besar pula peluang mereka memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup keluarganya," tambahnya.

Secara historis, pemerintah Indonesia terus memperkuat pendidikan vokasi sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan pendidikan vokasi menjadi salah

masing-masing," demikian penegasan dalam Surat Edaran Nomor 8/687/100.4H/VII/2026.

Berdasarkan edaran itu, kegiatan pembersihan dan penataan lingkungan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 10 Juli dan Jumat, 17 Juli 2026. Pemerintah daerah menilai lingkungan yang bersih dan tertata menjadi bagian penting dalam mencerminkan wajah daerah sekaligus menyambut tamu maupun masyarakat yang mengikuti rangkaian peringatan HUT.

Selain gerakan pembersihan, seluruh instansi diwajibkan memasang umbul-umbul dan spanduk ucapan HUT Kabupaten Buton Tengah mulai 9 hingga 31 Juli 2026. Dekorasi tersebut diharapkan menciptakan suasana semarak di seluruh wilayah kabupaten selama bulan peringatan hari jadi.

"ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah diwajibkan mengenakan pakaian dengan sentuhan daerah Kabupaten Buton Tengah pada 16 sampai dengan 24 Juli 2026," sebagaimana tertuang dalam salah satu poin surat edaran tersebut.

Tema "Menuju Kota Santri dan Kota Pendidikan Bermanfaat Berdampak Global" mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Buton Tengah yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan karakter masyarakat melalui pendidikan dan nilai-nilai keagamaan. Konsep ini sejalan dengan berbagai

kebijakan pemerintah di sejumlah daerah yang mengembangkan pendidikan berbasis budaya lokal sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di tengah persaingan global.

Secara historis, Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Buton berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 yang diresmikan pemerintah pada 23 Juli 2014. Sejak itu, setiap peringatan hari jadi menjadi momen evaluasi pembangunan sekaligus memperkuat masyarakat. Di tingkat nasional, peringatan hari jadi daerah telah menjadi tradisi untuk merefleksikan capaian pembangunan dan memperkuat identitas lokal, sedangkan secara internasional berbagai kota di dunia juga menjadikan perayaan hari jadi sebagai sarana membangun kebanggaan warga, mempromosikan budaya, serta memperkalkan potensi daerah kepada masyarakat global.

"Melalui kebersihan lingkungan, dekorasi daerah, dan pelestarian budaya lokal, semangat HUT Ke-12 diharapkan menjadi energi bersama untuk mewujudkan Buton Tengah sebagai Kota Santri dan Kota Pendidikan yang memberi manfaat serta berdampak di tingkat nasional maupun global," sebagaimana semangat dalam peringatan HUT Ke-12 Kabupaten Buton Tengah. (*)

Bupati Buton Tengah Dr Azhari Ajak Generasi Muda Tempuh Pendidikan Vokasi untuk Hadapi Persaingan Kerja

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP, M.Si mengajak para lulusan sekolah menengah di Indonesia, khususnya generasi muda yang ingin segera memasuki dunia kerja, untuk melanjutkan pendidikan di politeknik yang berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan. Menurutnya, pendidikan vokasi merupakan langkah strategis dalam mencetak tenaga kerja profesional yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. "Pendidikan vokasi menjadi pilihan tepat bagi generasi muda yang ingin memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia ker-



ja. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun masa depan yang lebih baik," kata Azhari.

Ia menjelaskan, politeknik BPSDM Kementerian Perhubungan memberikan pembelajaran yang berorientasi pada praktik sehingga lulusan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan sektor transportasi dan berbagai bidang industri. Bekal tersebut dinilai mam-

pu meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja yang semakin kompetitif.

"Lulusan politeknik BPSDM Kementerian Perhubungan memiliki kompetensi yang mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini menjadi modal penting dalam menghadapi perkembangan dunia kerja," ujarnya.

Azhari menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi akan berdampak

satu prioritas nasional melalui program revitalisasi pendidikan vokasi yang bertujuan menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Di tingkat internasional, penguatan pendidikan vokasi juga menjadi perhatian banyak negara maju seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Negara-negara

tersebut menjadikan pendidikan berbasis keterampilan sebagai fondasi utama dalam menyiapkan tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan mampu menghadapi perubahan teknologi serta persaingan ekonomi global.

Melalui ajakan tersebut, Bupati Azhari berharap semakin banyak generasi muda memanfaatkan kes-

empatan menempuh pendidikan di lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan. Menurutnya, investasi pada pendidikan vokasi bukan hanya membuka peluang kerja yang lebih luas, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap mendukung pembangunan nasional di masa depan. (*)

Bapas Baubau Luncurkan BERAksi, Edukasi 570 Siswa Cegah Kekerasan



Peliput: Andina L

BAUBAU, BP-Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Bau-bau resmi mengawali Road Show BERAK-SI (Bersama cEgah kekeRasan Anak di seKolah dengan edu-kaSI) sebagai bagian dari Program Sekolah Binaan Pemasarakatan. Program yang dimulai pada Senin (13/7/2026) itu menyasar tiga sekolah di Kota Baubau dengan melibatkan 570 siswa baru sebagai peserta edukasi pencegahan kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di SMK Negeri 3 Baubau. SMA Negeri 3 Baubau, dan SMA Negeri 5 Baubau. Pemilihan waktu bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS/MAPENALING) dinilai strategis karena menjadi fase awal pembentukan karakter peserta didik sekaligus momentum menanamkan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Program BERAKSI merupakan wujud komitmen Bapas Baubau dalam memperkuat sinergi den-

gan dunia pendidikan melalui Program Sekolah Binaan Pemas-yarakatan. Pendekat-an preventif tersebut diharapkan mampu menekan kenakalan remaja serta mence-gah anak berhadapan dengan hukum melalui edukasi yang berke-lanjutan sejak dini.

Dalam penyampaian materi, para Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bau-bau mengajak peserta mengenali berbagai bentuk kekerasan di sekolah, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga perundungan di ruang digital. Siswa juga diberikan pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun pelaku, serta pentingnya membangun budaya saling menghormati, saling peduli, dan berani melaporkan setiap tindakan kekerasan.

“MPLS merupakan momentum terbaik untuk menanamkan nilai-nilai anti kekerasan sejak hari pertama siswa memasuki lingkungan sekolah,” ujar tim Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Baubau saat memberikan materi.

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme siswa dan guru terlihat melalui diskusi yang aktif. Para

peserta tidak hanya mengikuti materi, tetapi juga terlibat dalam sesi tanya jawab mengenai langkah-langkah pencegahan bullying, penyelesaian konflik secara damai, serta mekanisme pelaporan apabila menemukan tindakan kekerasan di sekolah.

“Kami ingin sekolah menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang setiap peserta didik tanpa rasa takut,” kata salah seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam sesi edukasi.

Secara historis, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan semakin menguat setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komitmen tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta berbagai kebijakan

pemerintah mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Di tingkat internasional, UNESCO juga terus mengampunayakan penciptaan lingkungan belajar yang aman sebagai bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas.

“Pencegahan jauh lebih efektif dibanding penanganan setelah pelanggaran terjadi. Karena itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci utama,” ungkap narasumber dalam kegiatan tersebut.

Road Show BERAKSI dijadwalkan berlangsung hingga 16 Juli 2026 dengan men-
yasar seluruh SMA dan SMK di Kota Baubau. Melalui kolaborasi antara Bapas Baubau, pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu membangun ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta melahirkan generasi muda yang berkarakter, bertanggung jawab, dan taat hukum.(*)

HUT ke-58 BPJS Kesehatan, Perkuat
Komitmen Jaga Keberlanjutan Program
JKN



Peliput: Firman

JAKARTA, BP - BPJS Kesehatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 dengan mengusung tema “Menjaga Harapan Melalui Gotong Royong untuk Sehat Bersama”, Rabu (15/7/2026).

Momentum tersebut menjadi ajang refleksi atas perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia sekaligus mempertegas komitmen menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Perjalanan jaminan kesehatan nasional bermula dari pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada 15 Juli 1968. Organisasi tersebut kemudian bertransformasi menjadi Perum Husada Bakti, PT Askes (Persero), hingga akhirnya menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 sebagai penyelenggara Program JKN.

Kini, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285 juta jiwa dan menjadi salah satu program strategis nasional. Seiring perkembangannya, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai penyempurnaan, mulai dari peningkatan layanan di fasilitas kesehatan, pengembangan layanan digital, penyederhanaan administrasi, hingga memperluas akses pelayanan bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perjalanan penyelenggaraan jaminan kesehatan selama 58 tahun menunjukkan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan program.

Menurutnya, Program JKN yang kini memasuki tahun ke-13 merupakan hasil transformasi yang terus menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

“Selama 58 tahun penyelenggaraan jaminan kesehatan terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang terus mendukung keberlanjutan Program JKN. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN mampu mencetak generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Pujo saat Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.

Pujo mengungkapkan, keberlanjutan Program JKN menjadi fokus utama BPJS Kesehatan dalam menyusun strategi organisasi ke depan. Namun demikian, tantangan pembiayaan masih menjadi perhatian serius.

Ia menyebutkan rasio klaim Pro-

gram JKN saat ini telah mencapai 108 persen, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan regulasi baru agar keberlangsungan program tetap terjaga.

Meski menghadapi tantangan tersebut, BPJS Kesehatan masih melihat peluang memperkuat pendanaan melalui peningkatan kepatuhan peserta serta perluasan cakupan kepesertaan. Berbagai strategi juga disiapkan, antara lain integrasi kepesertaan JKN dengan layanan publik serta pengembangan layanan non tatap muka berbasis teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI Duding Abdurachman mengapresiasi kontribusi BPJS Kesehatan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional. Menurutnya, Program JKN merupakan salah satu pilar utama pembangunan kesehatan yang sejalan dengan visi pemerintah dan Asta Cita Presiden.

Dudung juga menyoroti sejumlah program kolaboratif BPJS Kesehatan yang mendukung prioritas pemerintah, seperti pemantauan kesehatan siswa dan petugas SPPG melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di Sekolah Rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih, hingga pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui kerja sama dengan TNI AL.

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama, mulai dari keberlanjutan pendanaan, kepatuhan peserta, hingga sinergi dengan fasilitas kesehatan. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.

Pada puncak peringatan HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga mencatatkan capaian penting dengan memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 untuk fungsi pengadaan dan investasi serta Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301. Sertifikasi tersebut menjadi bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memperkuat budaya integritas, transparansi, dan kepatuhan dalam penyelenggaraan Program JKN. (*)

PT FAREN GRAFIKA  KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
	Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betombari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betombari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara			

KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli, Penyidikan Dugaan Korupsi Kuansing Terus Berjalan



Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby tetap berlanjut, meskipun laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dinyatakan tidak ditindaklanjuti. KPK menegaskan, aspek pencegahan dan penindakan merupakan dua proses yang berbeda dalam penanganan perkara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/7) malam, mengatakan bahwa penyidik masih mendalami dugaan keterkaitan Raja Juli dalam konstruksi perkara tersebut. Menurutnya, hasil penyidikan sementara menunjukkan bahwa setelah mengumpulkan uang dari sejumlah pihak, Bupati Kuansing diduga menyerahkan uang tersebut kepada Menteri Kehutanan sehingga motif, tujuan, serta pihak yang memiliki inisiatif pemberian dana masih menjadi fokus penyelidikan. “Di pencegahan terkait laporan gratifikasi Pak Menteri sudah case closed. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya,” ujar Budi.

Ia menambahkan, penyidik akan menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh. “Uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik,” katanya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin membenarkan bahwa lembaganya tidak melanjutkan laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Raja Juli Antoni. “KPK menolak laporan gratifikasi RJ (Raja Juli),” ujar Aminudin saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (17/7).

Keputusan tersebut didasarkan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Dalam Pasal 14 Perkom tersebut diatur bahwa laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti apabila objek gratifikasi berupa barang yang mudah rusak, tidak dapat dijual atau digunakan, laporan disampaikan tidak sesuai ketentuan, perkara sedang dalam proses penyelidikan, atau penuntutan, maupun patut diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles sebagai tersangka dugaan suap jabatan. Selain itu, Suhardiman juga diproses hukum atas dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari hingga 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

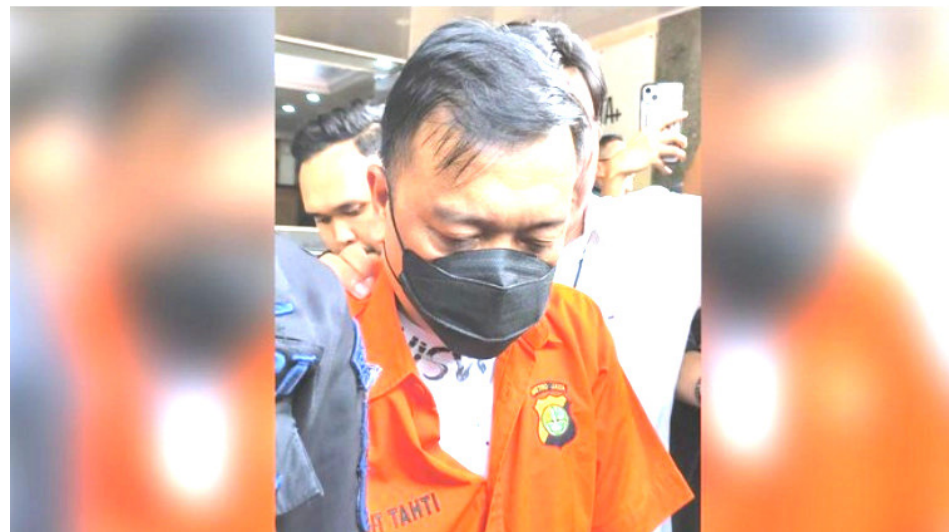
Suhardiman sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak pemberi dijerat Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Secara historis, kewajiban pelaporan gratifikasi menjadi bagian penting dari sistem pencegahan korupsi sejak KPK berdiri pada 2002 melalui Undang-Undang No-

mor 30 Tahun 2002. Ketentuan mengenai gratifikasi kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mewajibkan penyelenggara negara melaporkan setiap penerimaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Di tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai komitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi sesuai standar global.

Kasus dugaan korupsi di Kuantan Singingi menjadi salah satu perkara yang memperlihatkan pemisahan fungsi pencegahan dan penindakan di KPK. Di satu sisi, laporan gratifikasi dapat dinyatakan selesai berdasarkan ketentuan administratif, sementara di sisi lain penyidik tetap berwenang menelusuri dugaan tindak pidana korupsi apabila ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran hukum. Dengan mekanisme tersebut, KPK menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Polri Limpahkan Don Ritto dan Barang Bukti Rp543 Miliar ke Kejagung



Mabes Polri lewat Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya resmi melimpahkan tersangka pihak swasta Don Ritto beserta barang bukti emas 74 kilogram dan uang tunai sebesar Rp543 miliar ke Kejaksaan Agung (Kejagung)

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Kepolisian Republik Indonesia melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya resmi melimpahkan tersangka pihak swasta Don Ritto beserta barang bukti berupa emas seberat 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar kepada Kejaksaan Agung. Pelimpahan tahap II tersebut menjadi bagian dari penanganan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini memasuki proses penuntutan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pelimpahan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari pengalihan penanganan kasus dari Kepolisian kepada Kejaksaan Agung. “Penerbitan tiga surat perintah penyidikan dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengalihan perkara dari Kepolisian,” ujar Anang.

Tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan Kejaksaan Agung masing-masing berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada perkara PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN yang diduga mengakibatkan blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri.

Dalam perkara tersebut, penyidik

menetapkan dua orang tersangka, yakni Don Ritto selaku pihak swasta dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, sedangkan Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang terkait penanganan perkara PT Asabri maupun perkara dugaan korupsi lainnya.

Proses pelimpahan tersangka berlangsung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan pengamanan ketat dari personel Brimob Polda Metro Jaya yang didukung kendaraan taktis. Don Ritto tampak mengenakan pakaian tahanan, diborgol, dan memakai masker hitam. Selama proses pengawalan, ia memilih tidak memberikan pernyataan kepada awak media meski berulang kali mendapat pertanyaan.

Selain menyerahkan tersangka, penyidik juga membawa barang bukti yang tersimpan di dalam sejumlah boks kontainer, koper, serta sebuah brankas kecil. Barang bukti tersebut terdiri atas emas seberat 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar yang selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan. “Barang bukti diserahkan bersamaan

dengan pelimpahan tersangka sesuai ketentuan hukum acara pidana,” kata seorang penyidik di lokasi.

Untuk menangani perkara tersebut, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior. Mayoritas anggota tim diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tim dibentuk agar proses penyidikan berjalan profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Anang.

Secara historis, penanganan perkara korupsi melalui koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK telah menjadi bagian penting dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai komitmen memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk penelusuran aset hasil kejahatan, pemulihan aset (asset recovery), dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang lintas negara. (*)

Lepas Sambut Dandim 1413/Buton, Yusran Fahim Titip Sinergi Pembangunan



Pergantian pucuk pimpinan Kodim 1413/Buton menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Kota Baubau.

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pergantian pucuk pimpinan Kodim 1413/Buton menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Kota Baubau. Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., menghadiri acara lepas sambut Dandim 1413/Buton yang digelar Kamis malam (9/7/2026), sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama dan menyambut komandan baru.

Dalam acara tersebut, Letkol Inf. Arif Nofiyanto, S.E., M.M., resmi meninggalkan jabatan sebagai Dandim 1413/Buton untuk mengemban tugas baru sebagai Kasiren Grup 5 Kopassus. Posisi tersebut kemudian diteruskan oleh Letkol Inf. Yoni, S.Hub.Int., sebagai Dandim 1413/Buton yang baru.

Wali Kota Baubau menyampaikan penghargaan atas de-

dikasi Letkol Inf. Arif Nofiyanto selama bertugas di wilayah Baubau. Menurutnya, berbagai kerja sama yang telah terbangun menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung agenda pembangunan.

“Atas nama Pemerintah Kota Baubau dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama, sinergi, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Kota Baubau,” ujar Yusran Fahim.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru yang diterima Letkol Inf. Arif Nofiyanto. Menurutnya, promosi jabatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus penghargaan atas kinerja dan pengabdian yang telah dilakukan selama menjalankan tugas sebagai Dandim 1413/Buton.

Kepada pejabat baru, Letkol Inf. Yoni, Wali Kota Baubau berharap kepemimpinan

baru di tubuh Kodim 1413/Buton mampu melanjutkan hubungan harmonis antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia menilai kolaborasi lintas institusi menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan serta menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

“Selamat datang kepada Bapak Letkol Inf. Yoni. Kami berharap bertugas di Kota Baubau menjadi pengalaman yang menyenangkan, karena masyarakat Baubau terbuka dan menerima siapa pun yang datang untuk mengabdikan,” katanya.

Pergantian komandan satuan merupakan bagian dari sistem pembinaan karier di lingkungan TNI. Tradisi rotasi jabatan telah berlangsung sejak era awal pembentukan TNI pada masa revolusi kemerdekaan dan menjadi mekanisme untuk menjaga profesionalisme, regenerasi kepemimpinan, serta kesiapan organi-

sasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam konteks global, pergantian kepemimpinan militer juga menjadi praktik umum di berbagai negara sebagai bagian dari penguatan institusi pertahanan. Organisasi militer modern menempatkan rotasi jabatan sebagai upaya menjaga efektivitas komando, adaptasi strategi, dan kesinambungan pengabdian kepada negara.

Di akhir acara, Yusran Fahim mendoakan keberhasilan Letkol Inf. Arif Nofiyanto dalam menjalankan tugas barunya serta berharap hubungan silaturahmi yang telah terbentuk tetap terjaga.

“Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang baru. Pengabdian yang kita lakukan adalah untuk kepentingan daerah, bangsa, dan negara,” tutupnya. (*)

Menteri Haji Lirik Potensi Ikan Baubau untuk Pasokan Konsumsi Jamaah Haji



Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Potensi hasil laut Kota Baubau mulai dilirik pemerintah pusat untuk masuk dalam rantai pasok kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf, meninjau langsung sentra pengolahan ikan di Kelurahan Sulaa, Kota Baubau, sebagai langkah awal pengembangan ekosistem ekonomi haji berbasis produk lokal.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E. Menteri Haji dan Umrah melihat proses pengolahan hasil perikanan sekaligus mengidentifikasi kesiapan produk lokal agar dapat memenuhi kebutuhan pangan jamaah haji Indonesia yang setiap tahun mencapai ratusan ribu orang.

Irfan Yusuf mengatakan, pengembangan sektor pangan dalam penyelenggaraan haji merupakan bagian dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar aktivitas haji tidak hanya berorientasi pada pelayanan ibadah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

“Harapan Presi-

den Prabowo adalah agar ekosistem haji ini dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu, kami berpikir bagaimana bahan-bahan makanan yang dikonsumsi jamaah haji dapat berasal dari Indonesia,” ujar Irfan Yusuf.

Menurutnya, produk olahan ikan dari Kelurahan Sulaa memiliki peluang untuk dikembangkan. Namun, pemerintah masih perlu melakukan kajian lebih lanjut terkait standar teknis, mulai dari sistem pengemasan, keamanan pangan, distribusi, hingga regulasi yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.

“Secara produk saya kira ada dan bisa. Hanya saja persoalan teknis seperti pengiriman, packaging, dan aturan-aturan pemerintah Arab Saudi harus kita bahas lebih lanjut. Secara umum memungkinkan, tinggal bagaimana kemampuan teknis kita memenuhi standar yang ditetapkan,” katanya.

Pemerintah melihat daerah pesisir seperti Baubau memiliki keunggulan komoditas perikanan yang dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat rantai pasok pangan haji. Sementara daerah lain di Indonesia dapat berkontribu-

si melalui komoditas unggulan sektor pertanian maupun perkebunan.

Secara historis, Indonesia telah lama berupaya memperkuat peran ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sejak era awal penyelenggaraan haji nasional pada masa pemerintahan kolonial hingga pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017, pengelolaan ekosistem haji terus diarahkan agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Di tingkat global, Arab Saudi juga terus mengembangkan konsep layanan haji modern melalui program Saudi Vision 2030 yang mendorong peningkatan kualitas layanan, industri halal, serta keterlibatan sektor ekonomi berbagai negara.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Haji dan Umrah menugaskan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji untuk melakukan pembahasan lebih mendalam bersama kementerian, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Kajian tersebut akan menentukan peluang produk perikanan Baubau masuk dalam jaringan kebutuhan pangan jamaah haji Indonesia di masa mendatang. (*)